

Sejarah Arsitektur Ibu Kota Negara dan Tropikalitas Era Pasca Kolonial di Indonesia Melalui Fisiognomi Kota = The Architectural History of The Nation's Capital City And Tropicality of the Post Colonial Era in Indonesia Through Urban Physiognomy

Mandarin Guntur, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920538724&lokasi=lokal>

Abstrak

Fisiognomi secara umum merupakan metode untuk menilai ciri-ciri fisik yang tampak pada permukaan seluruh tubuh, khususnya wajah seseorang. Dalam tulisan ini, fisiognomi urban berfokus kepada pengetahuan tentang metoda fisiognomi urban secara empiris untuk memahami perubahan atau dinamika arsitektur dan ruang kota. Adapun dinamika arsitektur ruang IKN paska kolonial ini kemudian menelusurnya lebih lanjut melalui wacana tropikalitas dalam perspektif techno-socio-culture, mulai dari IKN Jakarta, rencana pemindahan IKN ke Palangka Raya hingga ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Metodologi sejarah ini melalui strategi multi narasi dan taktik sinkronis dan diakronis dari berbagai sumber seperti investigasi ke Jakarta, Palangka Raya dan Nusantara di Kalimantan Timur, diskusi, dokumen, foto, surat kabar, buku dan multi-media, Museum Tjilik Riwut, KITLV Leiden, Rijk Museum, Tropen Museum. Tujuan utamanya adalah untuk memahami makna yang muncul di masyarakat dan pemerintah terhadap sejarah pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia khususnya dinamika arsitekturalnya dengan penekanan pada masa kepresidenan Sukarno, Suharto, dan Joko Widodo. Analisis menunjukkan bahwa terbentuknya IKN-Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur telah mencakup perubahan arsitektur dan perkotaan masa kini dibandingkan dengan terbentuknya Jakarta yang bangkit dari era kolonial. Disertasi ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan rinci melalui fisiognomi perkotaan secara empiris dan tropikalitas Ibu Kota Negara di Indonesia mengungkapkan bahwa kompleksitas ruang kota IKN-Jakarta dan arsitekturnya melebihi karakteristik permukaannya. Ditemukan bahwa dengan merosotnya kualitas kota Jakarta adalah sebuah alasan untuk memindahkan IKN negara yang baru ke Kalimantan. Paska Kolonial di Indonesia dengan politik demokrasinya telah mengubah cara pandang baru arena kontestasi, sebuah jalan untuk mendominasi Indonesia (neo-post kolonial) yang perlu menjadi perhatian.

.....Physiognomy is generally a method for assessing physical features that appear on the entire body's surface, especially a person's face. In this paper, urban physiognomy focuses on knowledge of urban physiognomy methods empirically to understand changes or dynamics of architecture and urban space. The dynamics of post-colonial IKN space architecture were then explored further through the discourse of tropicality in a techno-socio-cultural perspective, starting from IKN Jakarta, the plan to move IKN to Palangka Raya to IKN Nusantara in East Kalimantan. This historical methodology is through multi-narrative strategies and synchronic and diachronic tactics from various sources such as investigations to Jakarta, Palangka Raya, and Nusantara in East Kalimantan, discussions, documents, photographs, newspapers, books and multi-media, Tjilik Riwut Museum, KITLV Leiden, Rijk Museum, Tropen Museum. The main objective is to understand the meaning that arises in society and government to the history of the relocation of Indonesia's national capital (IKN), especially its architectural dynamics, emphasizing the presidencies of Sukarno, Suharto, and Joko Widodo. Analysis shows that the formation of IKN-Indonesia in Nusantara, East Kalimantan, has included changes in today's architecture and cities compared to Jakarta's formation, which

rose from the colonial era. This dissertation concludes that a detailed examination through empirical urban physiognomy and tropicality of the national capital in Indonesia reveals that the complexity of the IKN-Jakarta urban space and its architecture exceeds its surface characteristics. It was found that the deterioration in the quality of Jakarta was a reason to move the new state IKN to Kalimantan. Post-colonial Indonesia, with its democratic politics, has changed a new way of looking at the arena of contestation, a path to dominate Indonesia (neo-post-colonial) that needs attention.